

KATEGORI

Perekonomian

SUB KATEGORI

Keuangan Daerah

NAMA INDIKATOR

Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD))

TAHUN

2017

KONSEP

- **Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD** adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah terhadap seluruh pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah disuatu daerah tertentu.
- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- **Pendapatan Daerah** adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RUJUKAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Rupiah

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui besaran Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD di suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD menunjukkan besarnya Pendapatan Asli Daerah terhadap seluruh pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah disuatu daerah tertentu.

KETERANGAN

APBD terdiri atas:

- Anggaran pendapatan, terdiri atas

? Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain

? Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

? Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

? Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

? Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

